



**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 89 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Narahubung Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Narahubung Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menjadi narahubung program Reformasi Birokrasi antara Unit Organisasi Eselon II dengan Sekretariat;

- b. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II;
- c. sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II serta berkoordinasi dengan Agen Perubahan; dan
- d. menyiapkan dokumen data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Unit Organisasi Eselon II.

Agen Perubahan pada Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju untuk Reformasi Birokrasi;
- b. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya tentang pentingnya Reformasi Birokrasi;
- c. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju unit organisasi yang lebih baik;
- d. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi menuju ke arah yang lebih baik;
- e. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi terkait dengan proses perubahan;
- f. membuat konsep rencana aksi Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II;



- g. sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II yang mengkoordinir Narahubung Reformasi Birokrasi;
- h. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi terkait program Reformasi Birokrasi antar Unit Organisasi Eselon II di dalam Unit Organisasi Eselon I yang sama, dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, serta dengan para pengambil keputusan; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi di Unit Organisasi Eselon II bersama-sama dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta Inspektorat LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Narahubung Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan Agen Perubahan di Unit Organisasi Eselon II masing-masing.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM NARAHUBUNG  
REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN  
PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 89 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>	
Pengarah	Roni Dwi Susanto	Kepala LKPP	LKPP	
Ketua	Suharti	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
Anggota				
	1.	Mahfuzan Zakaria	Analisis Perencanaan	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2.	Sulmiari	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	3.	Atmojo Heri	Analisis Tata Usaha	
	4.	Ardian Hoppin Sitompul	Analisis Hukum	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	5.	Manshur Riadli	Analisis Jabatan	
	6.	Himawan Aditya Perdana	Auditor Pertama	Inspektorat
	7.	Yosi Febriani	Widyaiswara Pertama	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
	8.	Beta Romadiyanti	Widyaiswara Pertama	

9.	Eva Sinaga	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
10.	Yasmine Permata Sari	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
11.	Rinatri Rahmayanti	Analisis Sistem Informasi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
12.	Meylina Putri Fabisari	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
13.	Adi Afrianto	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
14.	Desi Kartika	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
15.	Vialita Octaviani	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
16.	Prima Salti	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Sertifikasi Profesi
17.	Galuh Arini Sasi Kirono	Analisis Sistem Informasi	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
18.	Annisa Erviena Haniev	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi
19.	Dian Arsita Wardhani	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi
20.	Aisyah Khoirun Nisa	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi
21.	Yustitia Fernando	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi

				Pemerintah Daerah
22.	Jefry Seftian	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
23.	Tinta Nurvitania	Pengelola Data Monitoring Berkas Sengketa		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM NARAHUBUNG  
REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN  
PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 89 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Organisasi
1.	Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Dodi Wahyugi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3.	Rinaldi Morintosh	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4.	Yulia Dela Dacrea	Inspektorat
5.	Hardi Afriansyah	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
6.	Antonius Lambok Sihombing	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7.	Rusli Maryadi	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Theodore Sutarto	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
9.	Mustika Rosalina Putri	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
10.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog



11.	Fajar Adi Hemawan	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Januar Indra	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13.	Muhammad Firdaus	Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Selamet Budiharto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
15.	Tjipto Prasetyo Nugroho	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
16.	Ichwan Makmur Nasution	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO